KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Triwulan III
2018

Penyusun:
Penanggung Jawab: Kepala Kanwil DJPb Prov. Riau | Ketua Tim: Kepala Bidang PPA II | Editor: Hasan Fauzi, Henjang Prasetiawan | Anggota: Sugino | Nurmiati | Rini Apriani| Tsani Rozak Budiarto | Lely Anita

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Provinsi Riau

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI RIAU
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.249 PEKANBARU28116
TELEPON 0761 22686 FAKSIMILI 0761 22647 WEBSITE www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/riau

Nomor : S - 1668 /WPB.04/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Provinsi Riau Triwulan III tahun 2018

15 November 2018

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran
Gedung Prijadi Praptopsuhardjo I lantai 1 dan 2
Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta 20710

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini disampaikan Kajian Fiskal Regional Provinsi Riau Triwulan III tahun 2018

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

KEPALA KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU

Tri Budhianto

KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI RIAU

TRIWULAN III 2018

DAFTAR ISI

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1
B. Inflasi 2
C. Indikator Kesejahteraan 3
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 4
A. Pendapatan Negara 5
B. Belanja Negara 9
C. Prognosis Realisasi APBN 12
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 13
A. Pendapatan Daerah 14
B. Belanja Daerah 16
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018 18
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 19
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 19
B. Pendapatan Konsolidasian 19
C. Belanja Konsolidasian 20
D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB 22
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 23
A. Optimalisasi BUMDes untuk Akselerasi Perekonomian Desa (Riau Pos ,28 september 2018) 23
B. Tiga Kawasan Industri di Provinsi Riau, TribunPekanbaru 1/7/2018 24

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Kondisi ekonomi regional di Provinsi Riau triwulan III tahun 2018 menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi 2,98% (y-on-y) dengan tingkat inflasi 2,45% (y-on-y), tingkat pengangguran terbuka 6,20%, dan tingkat kemiskinan sebesar 7,39%. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut masih berada di bawah target Pemda (RKPD), sedangkan indikator lainnya memiliki capaian yang sesuai dengan target RKPD maupun target nasional (RKP), kecuali tingkat kemiskinan yang masih belum sesuai dengan RKP.

Tabel Indikator Ekonomi Triwulan III 2018 beserta Target dalam RKPD dan RKP

Indikator Ekonomi	TW III	RKPD	RKP
Pertumbuhan Ekonomi (*y-on-y*)	2,98	3,07	3,73
Tingkat Inflasi (*y-on-y*)	2,45	4,58	4,32
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,20	6,30	6,68
Tingkat Kemiskinan	7,39	7,40	6,35

Sumber: BPS Provinsi Riau, Bappenas, Bappeda Provinsi Riau

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Provinsi Riau triwulan III 2018 mencapai Rp196,17 triliun atau Rp29,46 juta perkapita. Angka ini merupakan PDRB terbesar ke-5 di Indonesia dan terbesar di luar pulau Jawa dan secara spasial berkontribusi sebesar 5,05% terhadap perekonomian nasional. Penyumbang terbesar PDRB adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 28,64%, diikuti oleh industri pengolahan 24,51% dan pertanian, kehutanan dan perikanan 22,04%. Ketiga lapangan usaha ini menjadi andalan perekonomian Riau dari tahun ke tahun karena besarnya hasil tambang minyak bumi dan gas alam, luasnya perkebunan kelapa sawit.

Dari sisi pengeluaran, struktur PDRB didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 34,99%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 32,86%, dan Ekspor Barang dan Jasa 29,79%. Konsumsi rumah tangga ini didominasi konsumsi makanan, minuman, dan rokok dan konsumsi untuk transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya. Penyumbang terbesar PMTB adalah investasi dalam bentuk bangunan dan pengeluaran untuk ekspor barang dan jasa berasal dari ekspor barang, sebagian besar berasal dari ekspor lemak dan minyak nabati/hewani dan minyak mentah.

Ekonomi Provinsi Riau triwulan III 2018 terhadap triwulan II 2018 (q-to-q) tumbuh sebesar Rp7,89 triliun atau 4,22 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT). Ekspor tumbuh sebesar 14,03 persen erat kaitannya dengan pertumbuhan

berbagai produk kimia; kertas dan karton; dan lemak minyak hewan/ nabati (turunan CPO). Sementara itu, konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar -0,32 persen. Konsumsi rumah tangga turun dibandingkan triwulan sebelumnya dimana terdapat bulan Ramadhan dan Lebaran.

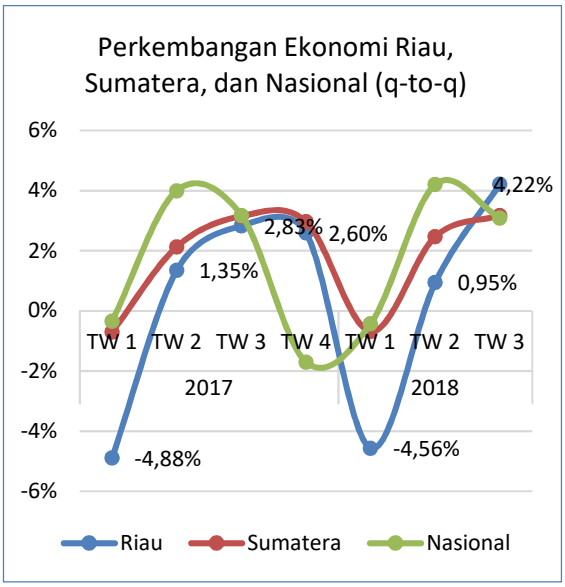

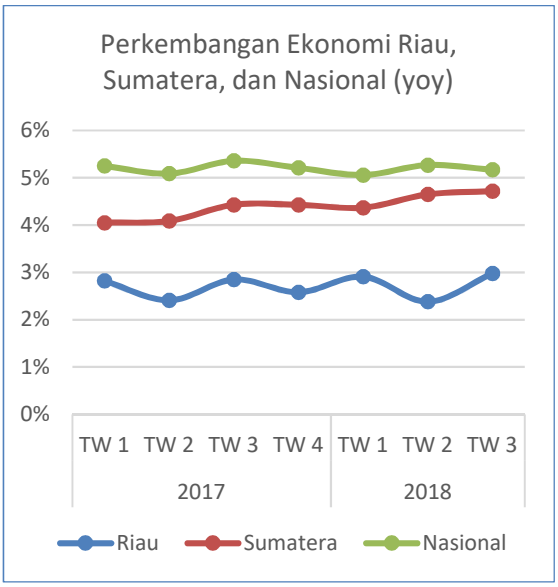

Sumber: BPS Provinsi Riau

B. Inflasi

Inflasi bulanan (*m-to-m*) di Provinsi Riau mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2018. Tercatat inflasi tertinggi terjadi bulan Januari sebesar 0,57% dan deflasi tertinggi bulan Februari sebesar 0,27%. Sementara itu pada akhir triwulan III tahun 2018 di Provinsi Riau mengalami deflasi 0,26%, jauh di atas deflasi nasional yang mencapai 0,18%.

Dari tiga kota yang disurvei di Provinsi Riau, semua kota mengalami deflasi dengan besaran berbeda. Kesemuanya lebih besar dari angka deflasi Nasional. Kota Pekanbaru mengalami deflasi sebesar 0.21%, kota Dumai mengalami deflasi sebesar 0.26%, dan Tembilahan sebesar 0.75%.

Deflasi Riau September 2018 terjadi karena adanya penurunan harga pada dua kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,60 persen, dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen. Sedangkan lima kelompok lainnya mengalami inflasi, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas 0,53 persen, diikuti kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,19 persen, kelompok

sandang 0,17 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dan kelompok kesehatan masing-masing sebesar 0,08 persen. Adapun Inflasi tahunan (*y-on-y*) pada akhir triwulan III 2018 berada pada level 2,45%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi pada akhir triwulan III 2017 yang mencapai 5,08%, dan berada di bawah inflasi tingkat nasional sebesar 2,88%, dan juga berada di bawah ambang batas besaran angka inflasi pada RKP dan RKPD tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 4,32% dan 4,58%.

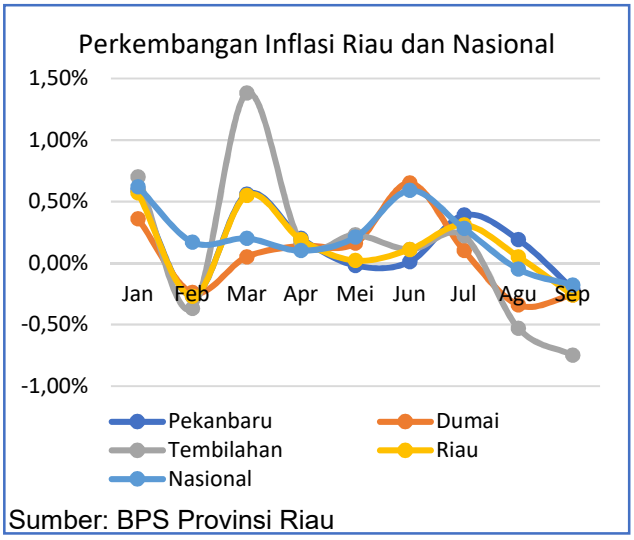

Sumber: BPS Provinsi Riau

C. Indikator Kesejahteraan

Penduduk miskin di Provinsi Riau bulan Maret 2018 sebanyak 500,44 ribu orang atau 7,39% dari total penduduk. Kemiskinan ini tersebar di Perkotaan (6,35%) dan Pedesaan (8,09%). Jika dibandingkan pada Maret 2017, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 14,18 ribu jiwa atau 0,39 poin. Hal ini sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan secara nasional, dari 10,70% pada Maret 2017 menjadi 9,82% pada Maret 2018. Penurunan tingkat kemiskinan ini, terutama di pedesaan diduga akibat peningkatan pendapatan masyarakat sebagai dampak pengganda dari berhasilnya program pemerintah melalui penyaluran dana desa.

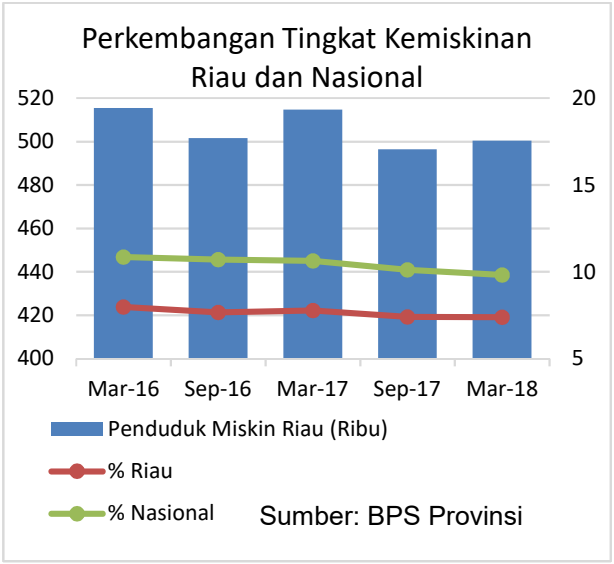

Sumber: BPS Provinsi

Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran. Angkatan kerja di Riau bulan Agustus 2018 sebanyak 3,11 juta orang, bertambah 0.14 juta orang dibandingkan tahun lalu sebanyak 2,97 juta orang. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2018 sebanyak 192,72 ribu orang atau 6,20%, turun 0,02% poin dibandingkan Agutus tahun 2017 yang berjumlah 184.56 ribu orang atau 6.22%. TPT di perkotaan 8,87%, lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang hanya 4,41%. Angka TPT di Riau menduduki peringkat

ke-7 tertinggi di Indonesia dan ke-3 di regional Sumatera. Peningkatan angkatan kerja dan penurunan TPT sejalan dengan perekonomian di Riau yang tumbuh 2,98%.

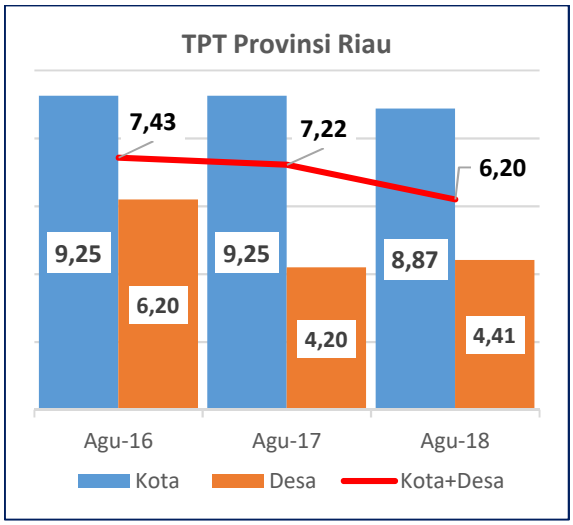

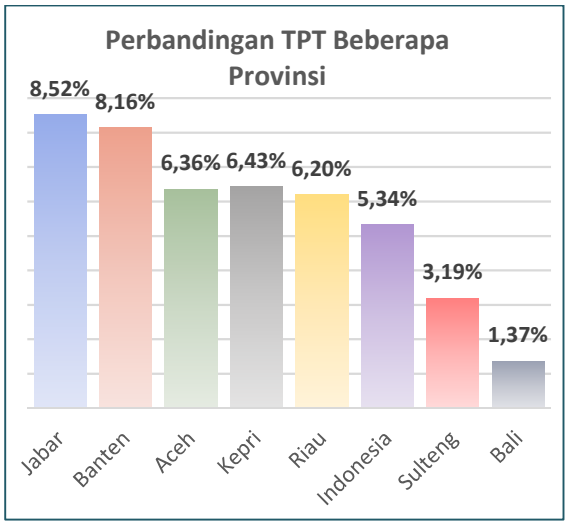

Sumber: BPS Provinsi Riau

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Pada tahun 2018 Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar Rp17,95 triliun dan pagu belanja sebesar Rp30,05 triliun. Target ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp18,09 triliun dan pagu belanja tahun lalu Rp28,99 triliun.

Tabel Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
A. PENDAPATAN NEGARA	**18.099**	**9.980**	**55,14**	**17.945**	**11.455**	**63,83**
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	18.099	9.980	55,14	17.945	11.455	63,83
1. Penerimaan Pajak	17.486	9.298	53,17	17.311	10.852	62,69
2. PNBP	613	682	111,36	634	603	95,11
II. HIBAH	-	-	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	**28.990**	**19.542**	**67,41**	**30.100**	**20.890**	**69,40**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	6.542	4.158	63,56	8.447	4.749	56,22
1. Belanja Pegawai	2.627	1.914	72,86	2.803	2.054	73,30
2. Belanja Barang	2.676	1.561	58,33	3.734	1.965	52,62
3. Belanja Modal	1.204	667	55,40	1.894	724	38,21
4. Belanja Bantuan Sosial	36	15	41,67	16	6	36,24
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-
II. TKDD	**22.448**	**15.384**	**68,53**	**21.653**	**16.141**	**74,54**
1. Transfer ke Daerah	21.179	14.624	69,05	20.393	15.385	75,44
a. Dana Perimbangan	21.156	14.601	69,02	20.239	15.236	75,28
1) Dana Bagi Hasil	8.060	6.173	76,59	7.748	5.244	67,68
2) Dana Alokasi Umum	8.907	4.898	54,99	8.147	7.015	86,10
3) Dana Alokasi Khusus	4.188	2.296	54,82	4.344	2.977	68,54
b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
c. Dana DIY	-	-	-	-	-	-
d. Dana Transfer Lainnya	23	23	100,00	154	150	97,08
2. Dana Desa	1.269	760	59,89	1.260	756	59,98
SURPLUS (DEFISIT)	**(10.891)**	**(9.562)**	**87,79**	**(12.155)**	**(9.435)**	**77,63**

Sumber: OMSPAN, Kanwil DJP Riau Kepri, Kanwil DJBC Riau (diolah)

Realisasi pendapatan negara di Riau sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp11,46 triliun, naik Rp1,47 triliun (14,77%) dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula dengan realisasi belanja negara naik Rp1,35 triliun (6,90%), karena didukung kenaikan realisasi belanja pemerintah pusat Rp0,6 triliun dan kenaikan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp0,76 triliun. Defisit pada triwulan ini sebesar Rp9,435 triliun, lebih besar dibanding defisit tahun lalu sebesar Rp8,903 triliun. Pendapatan negara di Riau berkontribusi sangat kecil terhadap pendapatan negara secara nasional yaitu 0,87% dari Rp1.312,3 triliun, sedangkan untuk belanja negara kontribusi untuk nasional sebesar 1,38% dari Rp1.512,6 triliun.

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

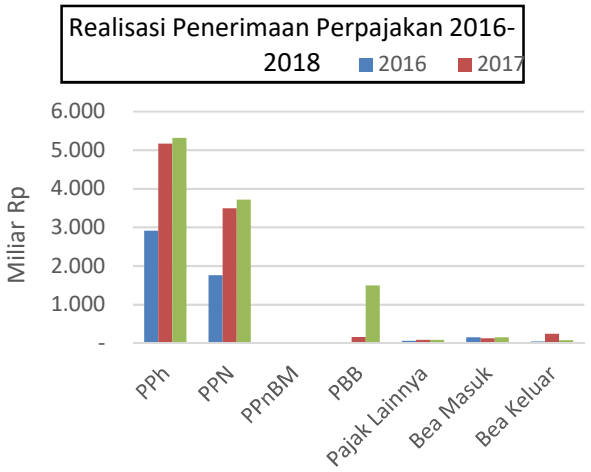

Sumber: Kanwil DJP Riau Kepri & Kanwil BC Riau

Sampai dengan akhir triwulan III 2018, penerimaan perpajakan di Riau dapat terealisasikan sebesar Rp10,85 triliun atau 62,69% dari target Rp17,31 triliun. Realisasi ini meningkat Rp1.554 miliar (16,71%) dari tahun 2017. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp9,11 triliun dan pendapatan pajak internasional sebesar Rp232,91 miliar. Dengan capaian tersebut sebenarnya telah menunjukkan bahwa program pemerintah di bidang perpajakan tahun ini behasil menongkrak penerimaan antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 yang lebih dikenal dengan Pengungkapan Asset Sukarela dengan Tarif PPh Final (PASFINAL) dan penurunan tarif PPh final untuk pengusaha tertentu dari 1 persen menjadi 0,5 persen sebagaimana diatur daiam PP 23 Tahun 2018

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh sampai akhir triwulan III tahun 2018 sebesar Rp5,31 triliun, menyumbang 48,98% dari total penerimaan perpajakan atau 56,68% dari targetnya Rp9,38 triliun. Realisasi ini naik Rp143,73 miliar atau 2,78% dibanding penerimaan periode yang sama tahun lalu Rp4,17 triliun.

Penerimaan terbesar terjadi pada bulan April yaitu Rp944,30 miliar karena merupakan periode penyampaian SPT tahunan untuk wajib pajak badan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun Kanwil DJP Riau akan melakukan jemput bola pajak-pajak yang potensial dan menggugah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

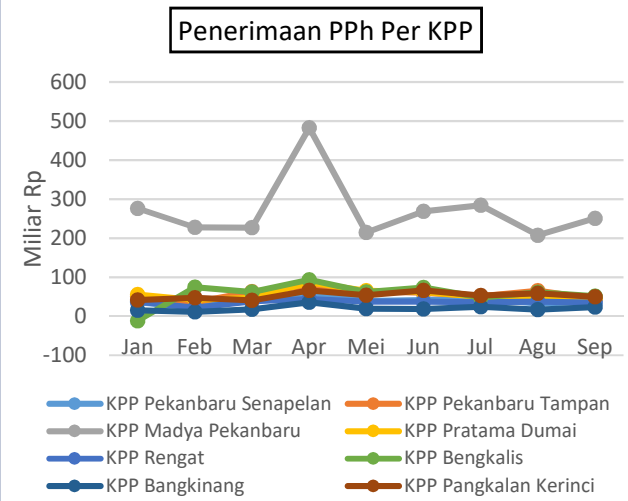

Sumber: Kanwil DJP Riau Kepri (diolah)

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN triwulan III 2018 sebesar Rp3,71 triliun, meningkat 6,33% dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp3,39 triliun. Penerimaan PPN berasal dari delapan KPP yang tersebar di Provinsi Riau dengan capaian tertinggi di wilayah Kota Pekanbaru yang dikelola oleh KPP Madya Pekanbaru senilai Rp797,49 miliar (21,47%) dan KPP Pratama Pekanbaru Tampan Rp618,08 miliar (16,64%), diikuti oleh Kab. Kampar dan Rohul melalui KPP Pratama Bangkinang sebesar Rp521,94 miliar atau 14,05% dari total penerimaan. Penerimaan terbesar terjadi di bulan Juni sebesar Rp476,24 miliar

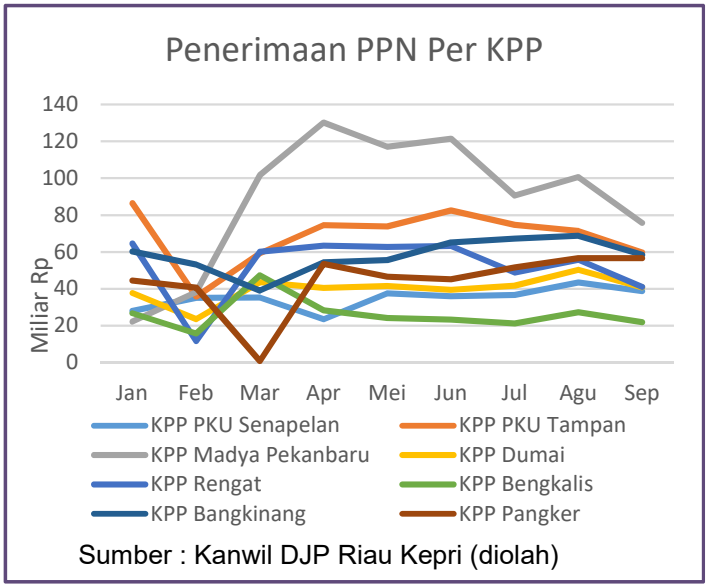

Sumber : Kanwil DJP Riau Kepri (diolah)

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penerimaan PPnBM terealisasi 29,15% (Rp3,97 miliar) dan hanya berkontribusi 0,04% dari total penerimaan perpajakan, turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 dan 2016 yaitu Rp5,84 miliar dan Rp10,62 miliar. Sebagian besar pendapatan PPnBM berasal dari KPP Madya Pekanbaru sebesar

Rp2,19 miliar (55,13%). Penerimaan terbesar terjadi di bulan Mei sebesar Rp1,54 miliar.

Secara nasional kinerja positif dari penerimaan PPh nonmigas, PPh migas, serta penerimaan PPN dan PPnBM yang tumbuh cukup signifikan menjadi faktor pendorong pertumbuhan penerimaan pajak, dimana pada periode Januari-September 2018 merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM hingga akhir September 2018 tumbuh 14,43% (yoy). Faktor kinerja aktivitas impor dan pertumbuhan konsumsi dalam negeri, masih menjadi pendorong pertumbuhan penerimaan PPN Impor dan PPN DN, masing-masing sebesar 27,52% (yoy) dan 8,22 % (yoy)

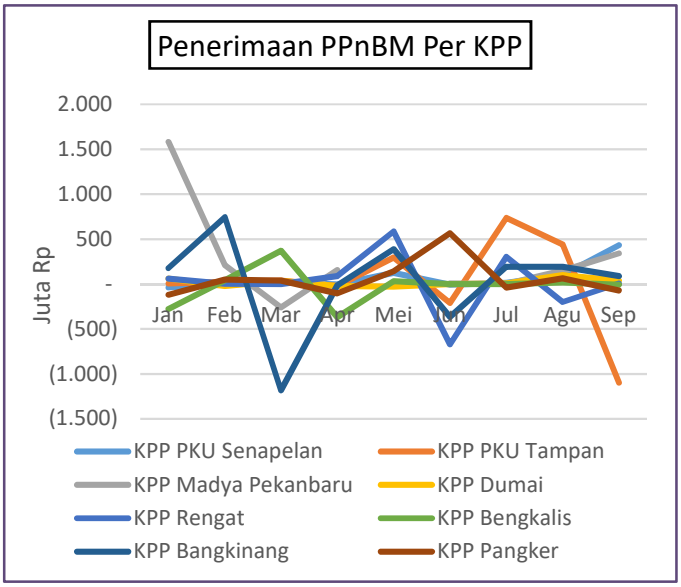

Sumber : Kanwil DJP Riau Kepri (diolah)

d. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan III tahun 2018 mencapai Rp235,32 miliar atau 89,03%, terdiri dari penerimaan bea masuk Rp155,83 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp79,47 miliar. Penerimaan pajak ini berkontribusi 2,17% terhadap total penerimaan perpajakan yang sebagian besar berasal dari KPPBC Pekanbaru dengan total Rp114,51 miliar, diikuti KPPBC Dumai sebesar Rp103,46 miliar. Penerimaan terbesar terjadi di bulan September senilai Rp67,63 miliar, diikuti penerimaan bulan Februari Rp24,57 miliar.

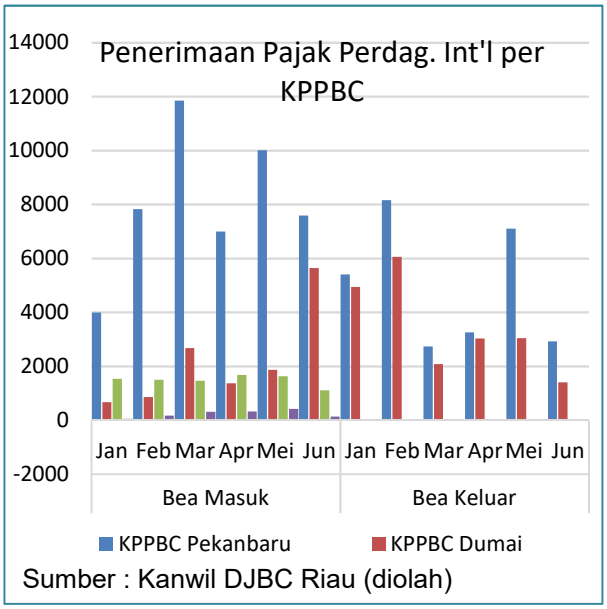

Sumber : Kanwil DJBC Riau (diolah)

Pekanbaru, halloriau.com, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau berhasil menghimpun pajak sebesar Rp11,6 triliun sampai dengan akhir Oktober 2018. Dengan capaian tersebut sebenarnya telah menunjukkan bahwa program pemerintah di bidang perpajakan tahun ini behasil menongkrak penerimaan antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 yang lebih dikenal dengan Pengungkapan Asset Sukarela dengan Tarif PPh Final (PASFINAL) dan penurunan tarif PPh final untuk pengusaha tertentu dari 1 persen menjadi 0,5 persen sebagaimana diatur daiam PP 23 Tahun 2018. (dimuat tanggal 08/11/2018)

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai triwulan III 2018 berjumlah Rp603 miliar, berkontribusi 5,26% terhadap total pendapatan. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan triwulan III 2017 yang mencapai Rp394,64 miliar. Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp214,19 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 176,75 miliar. Pendapatan PNBP Lainnya didominasi oleh pendapatan administrasi dan penegakan hukum Rp119,48 miliar dan pendapatan jasa transportasi, komunikasi dan informatika Rp61,77 miliar. PNBP terbesar disumbang Ristek Dikti, Kepolisian, dan Perhubungan.

Pendapatan BLU tercatat Rp176,75 miliar atau 45,21% dari total PNBP, lebih rendah dari pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp179,25 miliar. Pendapatan BLU terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp153,99 miliar yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau. Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp14,36 miliar berasal dari satker Rumkit Bhayangkara Pekanbaru.

Realisasi PNBP Menurut K/L (Miliar Rp)

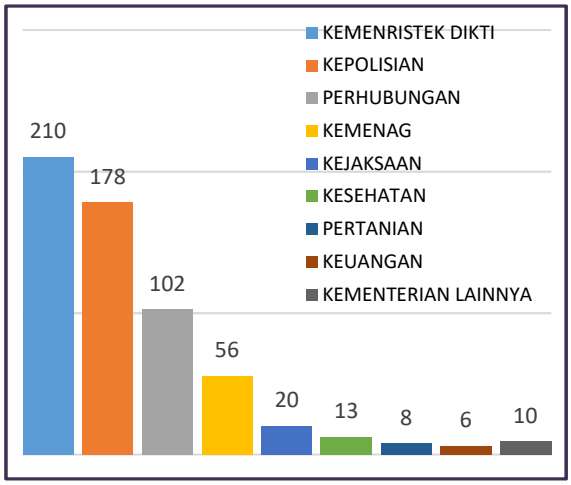

Realisasi Pendapatan BLU per Satker

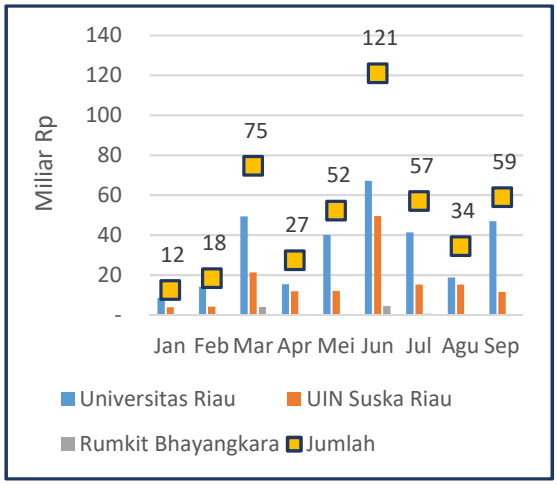

Sumber : OMSPAN (diolah)

APBN Kita - Capaian Realisasi PNBP ini mengalami pertumbuhan sebesar 27,13 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya penerimaan Sumber Daya Alam karena masih berlanjutnya kenaikan harga komoditas minyak bumi dan batu bara sepanjang periode Januari-September 2018. Realisasi penerimaan SDA Migas tumbuh sebesar 53,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan SDA Migas tersebut terutama

3. Pendapatan Hibah

Sampai dengan triwulan III 2018 tealisasi pendapatan hibah sebesar Rp131,8 miliar atau hanya 32,95% dari total pagu. Realisasi ini merupakan nilai hibah yang diterima Satker dan telah disahkan oleh KPPN.

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Hibah			
Hibah Langsung	383.759.953.000	131.802.434.28	32,95
Total Hibah	**383.759.953.000**	**131.802.434.28**	**32,95**

Sumber: MEBE

B. Belanja Negara

Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

1. Belanja Pemerintah Pusat

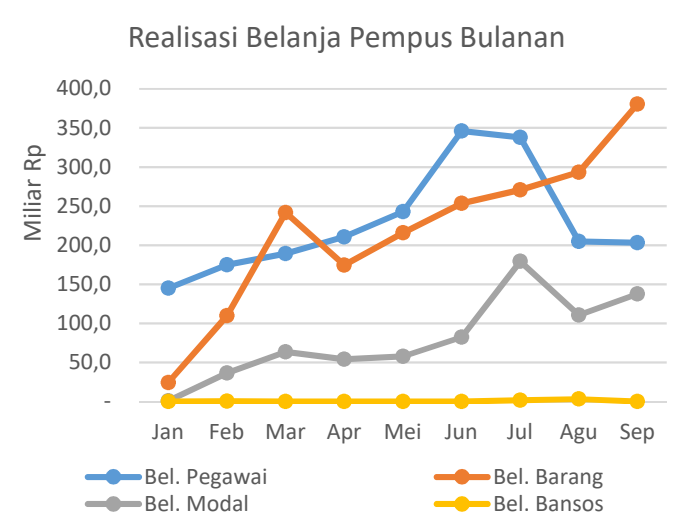

Sumber: OMSPAN (diolah)

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan triwulan III tahun 2018 tercatat Rp4,75 triliun atau 56,22% dari pagu belanja Rp8,45 triliun. Angka tersebut di bawah target persentase penyerapan anggaran sebesar 60%. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp2,05 triliun (73,30%), belanja barang Rp1,96 triliun (52,62%), belanja modal Rp724 miliar (38,21%), dan belanja bantuan sosial Rp5,67 miliar (36,24%). Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Juli senilai Rp789,46 miliar dimana belanja modal berkontribusi sebesar 22,71%, tertinggi sepanjang tahun berjalan. Total realisasi belanja pemerintah pusat tersebut mengalami peningkatan 14,21% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp4,16 triliun.

Dalam rangka mengakselerasi perekonomian tahun 2018, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengefektifkan belanja negara sesuai prioritas, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur, tercermin dalam setiap tema yang diangkat pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dengan tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

Berdasarkan kategori *output*, alokasi APBN dibagi menjadi empat kategori, yaitu infrastruktur, kesejahteraan, operasional, dan pelayanan publik, terbesarnya adalah kategori operasional Rp4,33 triliun (53,87%), naik 21,25%. Anggaran infrastruktur sebesar Rp2,16 triliun, mengalami penurunan 6,82%, anggaran kesejahteraan naik 83,98% menjadi Rp666 miliar, sedangkan anggaran pelayanan publik naik 22,23% menjadi Rp3,71 triliun. Besarnya kenaikan persentase anggaran belanja kesejahteraan ini mencerminkan perhatian sekaligus harapan yang besar dari pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di Riau.

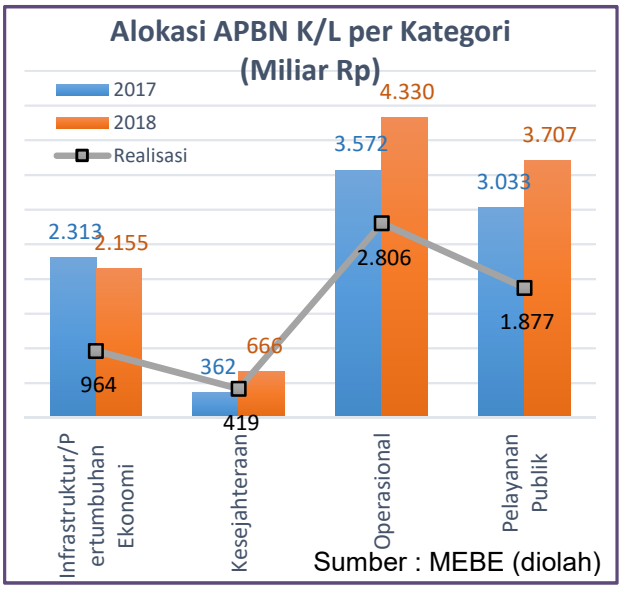

Realisasi belanja tertinggi adalah belanja kesejahteraan yang mencapai Rp4,19 triliun (62,85% dari pagu), disusul belanja operasional sebesar Rp2,81 triliun (64,80% dari pagu). Sedangkan belanja pelayanan publik dan infrastruktur sudah di angka Rp1,88 triliun (50,62% dari pagu) dan Rp964 miliar (44,74% dari pagu).

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2018 di Provinsi Riau mencapai Rp21,65 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp29,67 triliun. Realisasi TKDD sampai dengan triwulan III 2018 sebesar Rp16,08 triliun atau 73,34% dari total pagu. Jumlah ini berada sedikit lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp16,74 triliun namun lebih besar dari persentase tahun sebelumnya yang hanya 56,44% dari pagu.

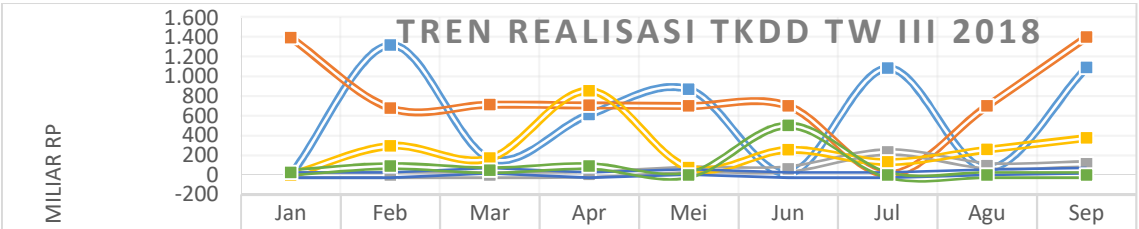

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
DBH	3	1.321	167	616	871	18	1.087	67	1.093
DAU	1.395	681	716	708	701	701	8	701	1.403
DAK Fisik	-	-	-	5	55	60	234	95	112
DAK Non Fisik	-	296	170	856	73	256	132	258	376
DID	-	-	45	-	32	-	-	28	45
Dana Desa	24	91	48	90	-	503	-	-	-

Sumber: Simtrada dan OMSPAN (diolah)

Realisasi TKDD terbanyak adalah transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7,01 triliun, diikuti transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp5,24 triliun, dan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp2,42 triliun. Untuk realisasi DAK Fisik baru sebesar Rp501 miliar atau 43,55% dari pagu dan Dana Desa sedah mencapai Rp755 miliar atau 59,98% dari pagu. Realisasi tertinggi TKDD terjadi di bulan September dengan total realisasi sebesar Rp3,03 triliun

3. Pengelolaan BLU

Tabel Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau sampai dengan Triwulan III TA 2018 (dalam Miliar Rp)

SATKER BLU	2017						2018					
	RM		BLU		SBSN		RM		BLU		SBSN	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Universitas Riau	213	146	304	94	-	-	218	152	314	149	-	-
UIN Suska Riau	157	141	134	48	43	1	171	89	126	43	56	12
Rumkit Bhayangkara Pekanbaru	5	3	15	11	-	-	5	3	21	8	-	-
Total	375	290	452	153	43	1	395	142	462	152	56	12

Sumber: MEBE,OMSPAN (diolah)

Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2018 sebesar Rp462 miliar. Meskipun secara nominal mengalami peningkatan, pagu ini turun secara porsi terhadap total pagu belanja dari turun dari 50,94% menjadi 50,60%. Sampai dengan triwulan III 2018, realisasi belanja sumber BLU menurun tipis *(y on y)* secara nominal maupun persentase, yaitu dari Rp153 miliar (33,52%) menjadi Rp152 (32,99%). Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai kebutuhan belanjanya semakin baik kedepannya.

4. Manajemen Investasi Pusat

Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah Daerah dan BUMD. Piutang negara yang berstatus aktif tersebar di lima debitur. Namun, saat ini hanya terdapat dua debitur yang masih mempunyai hutang kepada pemerintah pusat dengan total Rp20,41 miliar, sedangkan sisanya telah melunasi hutangnya.

Sementara itu, kredit program yang berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan Rp2,48 triliun, apabila dibandingkan dengan kawasan Sumatra maka realisasi KUR Riau menempati urutan keempat setelah Sumut, Sumbar dan Lampung (Rp.4,17 triliun, Rp3,19 triliun, dan Rp2,61). Menurut skema, pnyaluran KUR Kecil sebesar Rp1,22 triliun, KUR Mikro Rp1,14 triliun dan KUR TKI Rp194 juta.

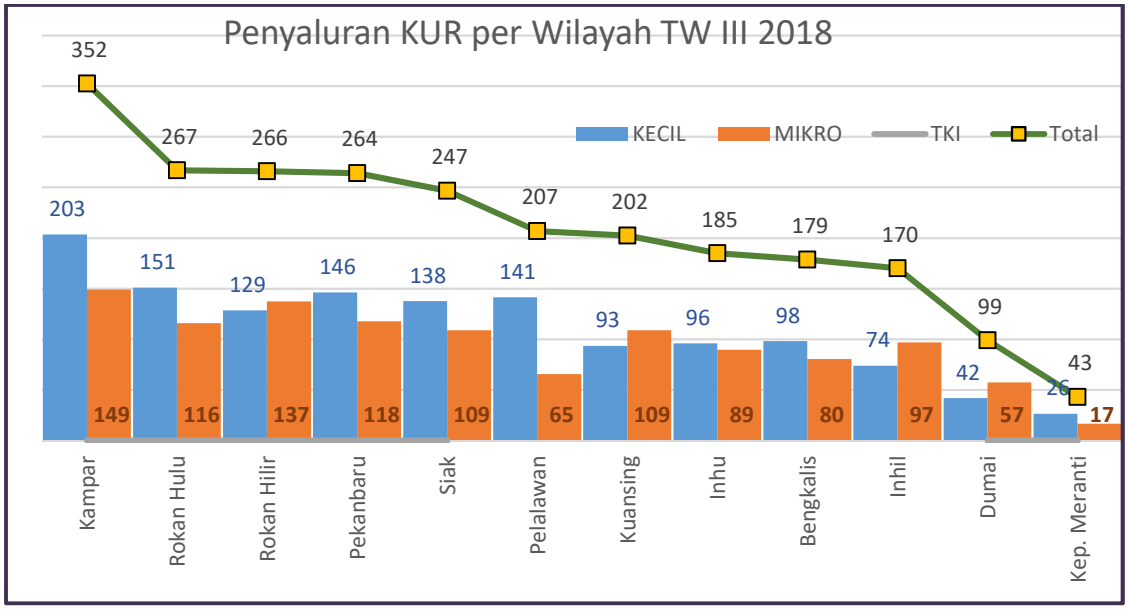

Sumber: SIKP (diolah)

C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan pendapatan negara dan belanja negara yang dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2018 di Riau menggunakan analisis forecasting dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Perkiraan pendapatan negara mempertimbangan perkembangan perekonomian dalam dan luar negeri serta perkembangan tingkat inflasi, sedangkan perkiraan belanja negara dipengaruhi kebijakan fiskal pemerintah, seperti program prioritas nasional pemerintah, nawacita, dan gerakan efisiensi belanja.

Pendapatan negara hingga akhir 2018 diperkirakan terealisasi Rp14,47 triliun (80,66%), meningkat dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2017 yang hanya 79,08%. Perkiraan kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berada di level 2,38% (y-on-y). Sementara itu, belanja negara diprediksi terealisasi Rp28,41 triliun atau 95,50% dari pagu belanja dan berada di atas realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar 76,19%.

Tabel Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau s.d. Triwulan IV Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Semester I		Perkiraan Realisasi s.d. TW IV	
		Rp	% Real	Rp	% Perkiraan Realisasi
Pendapatan Negara	17.945	11.455	63,83	17.318	96,51
Belanja Negara	30.100	20.890	69,40	28.413	94,39
Surplus/Defisit	(12.155)	(9.435)	77,63	(11.095)	91,27

Sumber: SPAN dan hasil prognosis menggunakan *forecasting*

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Tabel Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam Miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
PENDAPATAN	30.473	19.693	64,62	30.827	19.944	64,70
PAD	6.423	3.548	55,24	7.060	4.042	57,26
Pajak Daerah	4.337	2.490	57,42	4.799	2.893	60,28
Retribusi Daerah	385	121	31,53	359	109	30,32
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	393	277	70,47	418	291	69,68
Lain-Lain PAD yang Sah	1.308	659	50,42	1.485	750	50,48
Pendapatan Transfer	23.960	16.129	67,31	23.663	15.813	66,83
Transfer Pempus - Dana Perimbangan	19.623	14.658	74,70	20.961	14.395	68,67
Dana Bagi Hasil Pajak	5.148	2.450	47,59	4.348	2.032	46,73
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3.774	3.309	87,67	4.151	2.850	68,65
Dana Alokasi Umum	8.117	6.487	79,92	8.387	6.773	80,76
Dana Alokasi Khusus	2.583	2.411	93,36	4.075	2.740	67,23
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	2.771	808	29,17	1.569	901	57,41
Dana Otonomi Khusus	-	-		-	-	
Dana Penyesuaian	2.688	808	30,07	1.569	901	57,41
Transfer Pemerintah Provinsi	1.079	585	54,26	1.101	379	34,42
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1.079	502	46,53	1.101	372	33,81
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	83		-	7	
Transfer Bantuan Keuangan	488	77	15,86	32	139	433,19
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	488	77	15,86	32	139	433,19
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	90	16	18,16	104	88	84,83
Pendapatan Hibah	33	16	49,55	104	88	84,83
Pendapatan Dana Darurat	-	-		-	-	
Pendapatan Lainnya	-	-		-	-	
JUMLAH PENDAPATAN	30.473	19.693	64,62	30.827	19.944	64,70
BELANJA	31.448	14.712	46,78	27.512	14.343	52,13
Belanja Pegawai	11.918	7.173	60,19	10.784	7.156	66,35
Belanja Barang	8.023	3.296	41,08	8.538	4.257	49,86
Belanja Bunga	-	-		-	-	
Belanja Subsidi	43	12	29,20	32	9	29,25
Belanja Hibah	1.400	1.076	76,90	2.167	1.284	59,25
Belanja Bantuan Sosial	76	4	4,82	78	24	30,42
Belanja Bantuan Keuangan	2.791	760	27,24	-	-	
Belanja Modal	7.027	2.295	32,66	5.865	1.613	27,51
Belanja Tidak Terduga	170	2	0,89	48	0,42	0,86
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	1.665	1.072	64,38	4.541	1.945	42,83
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	1.427	571	40,03	1.555	453	29,16
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.427	570	39,97	1.548	452,82	29,25
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	1		7	1	8,61
Transfer Bantuan Keuangan	238	501	210,18	2.986	1.492	49,96
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	145		643	236	36,71
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	238	191	80,19	2.337	518	22,17
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	165		6	737	
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	33.113	15.784	47,67	32.053	16.288	50,82
SURPLUS/DEFISIT	(2.640)	3.909	(148,05)	(1.226)	3.656	(89,51)

Sumber: BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)

Sampai dengan triwulan III 2018, surplus anggaran mencapai Rp3,6 triliun, turun Rp253 miliar dibandingkan dengan triwulan III 2017. Penurunan surplus disebabkan peningkatan realisasi belanja dan transfer yang lebih besar (3,19%) dibandingkan dengan peningkatan realisasi pendapatan yang hanya naik tipis 1,27%.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terealisasi Rp19,94 triliun atau 64,70% dari target, naik tipis 0,08% dibandingkan triwulan III 2017. Kecilnya pertumbuhan realisasi pendapatan diduga karena adanya penurunan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari 10% menjadi 5%. Pendapatan daerah sebagian besar berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp15,81 triliun (79,29%) dan pendapatan asli daerah senilai Rp4,04 triliun (20,27%).

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2018 sebesar Rp7,06 triliun yang terdiri dari pajak daerah senilai Rp4,79 triliun atau 67,97%, retribusi daerah Rp359 miliar (5,08%), hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp418 miliar (5,92%), dan lain-lain PAD yang sah Rp1,48 triliun (21,03%). PAD di Provinsi Riau sampai triwulan III 2018 terealisasi Rp4,04 triliun atau 57,26% dari target, lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,55 triliun atau 55,24%. PAD terbesar disumbang oleh pendapatan pajak yang mencapai Rp2,89 triliun atau 71,56% dari total PAD.

a. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak terbesar berada di Pemerintah Provinsi Riau sebesar 76,84%, diikuti oleh Kota Pekanbaru sebesar 10,70% dan Kabupaten Siak sebesar 1,75% dari total penerimaan pajak se-Provinsi Riau.

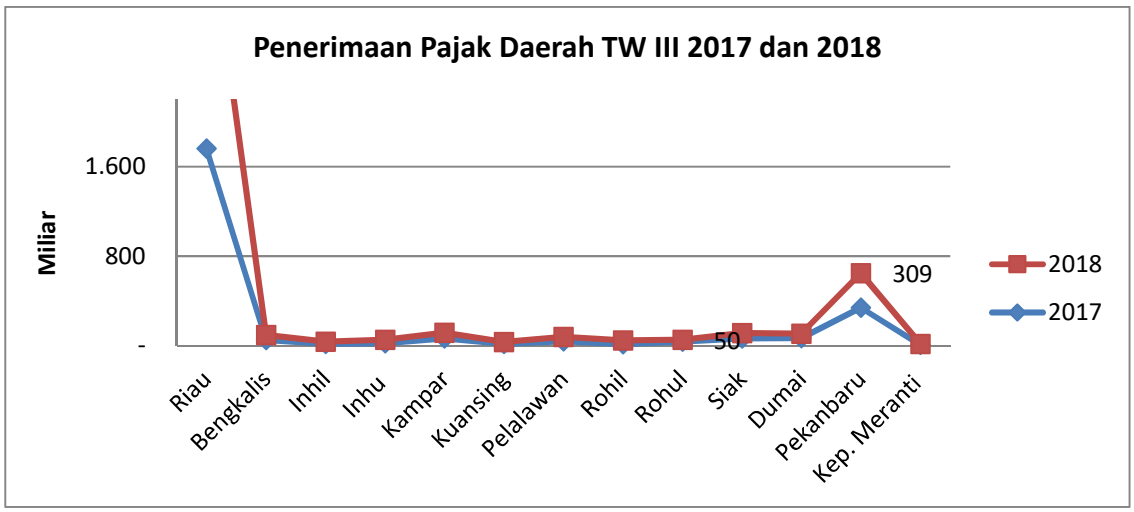

Sumber: BPKAD (diolah)

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah direalisasikan Rp109 miliar atau 30,32% dari target penerimaan, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang teralisasi Rp96,06 miliar. Penerimaan retribusi terbesar berada di Kota Pekanbaru Rp34,13 miliar (31,35%).

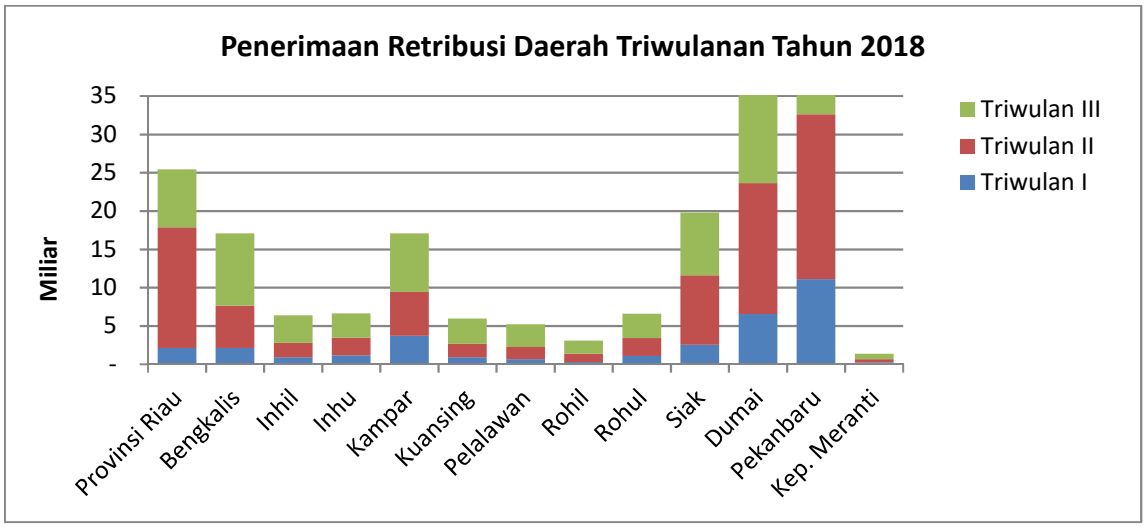

Sumber: BPKAD (diolah)

c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi Rp291 miliar (69,68%) dari target, naik Rp14 miliar (5%) dibandingkan triwulan III 2017 dan sebagian besar berasal dari bagian laba BUMD yang terealisasi di Pemerintah Provinsi Riau Rp108 miliar (37,34%).

Penerimaan PAD memberi kontribusi sebesar 20,26% dari total pendapatan daerah. Hal ini berarti rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

2. Pendapatan Transfer

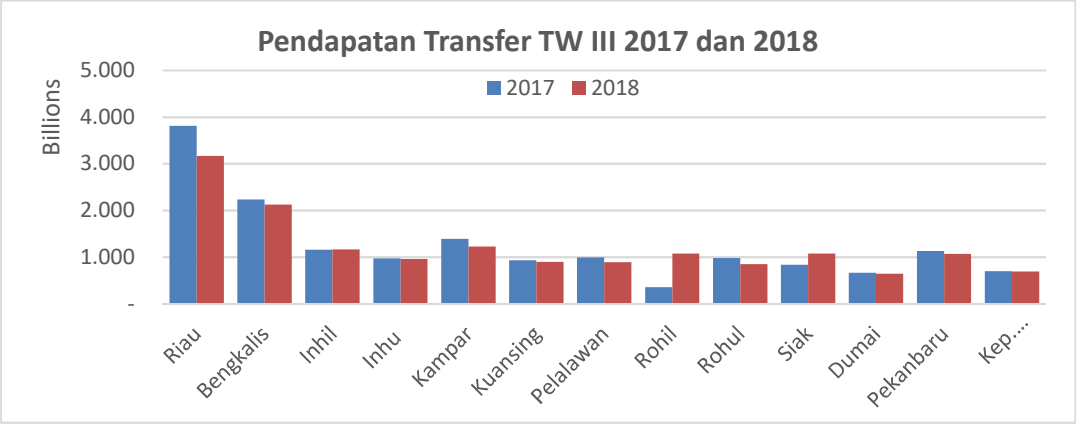

Sumber: BPKAD (diolah)

Target pendapatan transfer se-Riau tahun 2018 sebesar Rp23,66 triliun. Sampai dengan triwulan III tahun 2018, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp15,81 triliun (66,83%). Pendapatan transfer terbesar berada di Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp3,16 triliun (20,03%) dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp2,12 triliun (13,41%).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau terealisasi sebesar Rp88,22 miliar (84,83%), yang sebagian besar merupakan pendapatan hibah. Realisasi pendapatan ini berasal dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp2,04 miliar, Kabupaten Indragili Hulu sebesar Rp35,97 miliar, dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 50,2 miliar.

B. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah 2018 memberikan alokasi prioritas untuk sembilan program prioritas pembangunan, antara lain pembangunan infrastruktur; pembangunan SDM berkualitas melalui pendidikan; peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat; penurunan angka kemiskinan; peningkatan kualitas pelayanan masyarakat; peningkatan nilai budaya melayu; pembangunan pertanian dan perkebunan; peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan Peningkaan iklim usaha dan investasi.

Belanja daerah di Riau triwulan III 2018 direalisasikan Rp16,28 triliun atau 62% dari total pagu sebesar Rp 26,29 triliun. Pemrov Riau pada triwulan III 2018 ini meniadakan APBD-Perubahan dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD. Tunda salur dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat yang menjadi hak Pemrov dan Pemda juga turut andil menyumbang kecilnya angka realisasi belanja. Belanja modal sampai dengan triwulan III tahun 2018 direalisasikan sebesar Rp1,611 triliun. Program pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBD masih menjadi prioritas dan terus digesa. Beberapa proyek infrastruktur strategis di Provinsi Riau tahun 2018 yaitu pembangunan jembatan Siak IV, pembangunan *flyover* simpang SKA, pembangnan *flyover* pasar pagi, pembangunan jalan provinsi lintas bagan siapi-api, san Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Dumai-Rokan Hilir-Bengkalis.

Program kegiatan yang telah direncanakan harus dilakukan rasionalisasi untuk menjamin anggaran belanja cukup sampai dengan akhir tahun. Pemda diharapkan mampu mengharmonisasikan antara pendapatan dan belanja demi menjamin terlaksananya program dan ekgiatan yang telah direncanakan utamanya untuk belanja kepentingan publik. Kedepan, pemprov dan pemda juga harus mengantisipasi pendapatan yang tidak tercapai seperti tunda salur DBH triwulan IV tahun ini.

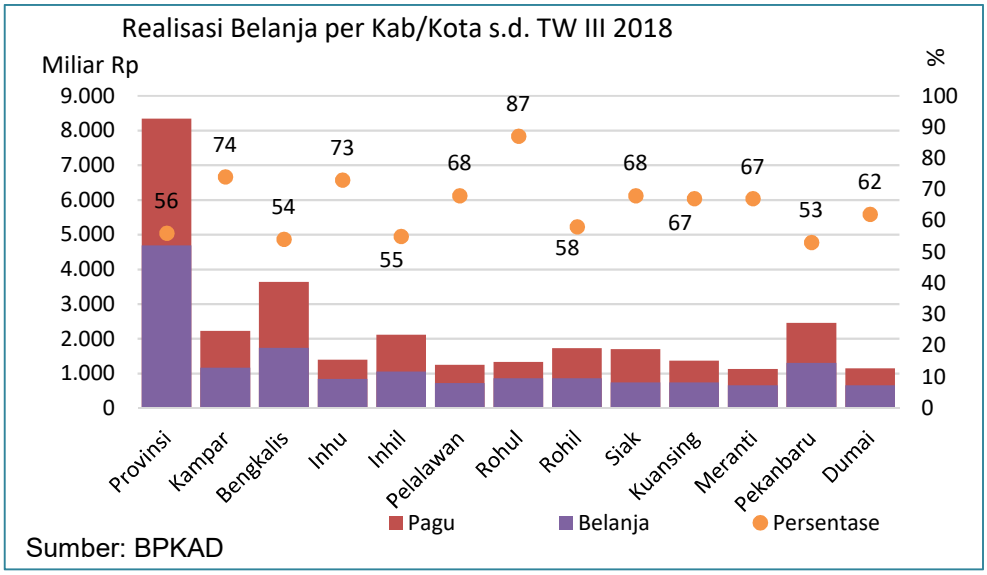

Sumber: BPKAD

Sampai dengan triwulan II 2018 pemda dengan tingkat penyerapan terbaik adalah Kab. Rokan Hulu sebesar 87% dan Kab kampar 74%. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja anggaran dari masing-masing OPD untuk menggesa beberapa kegiatan yang menyangkut kepentingan publik.

1. Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi

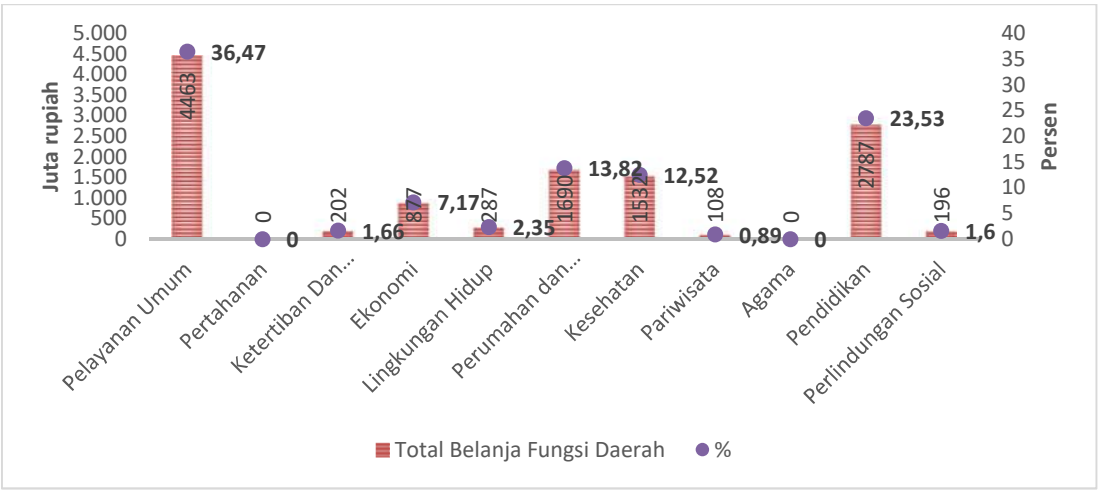

Sumber: BPKAD (diolah)

Klasifikasi belanja menurut fungsi merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu. Klasifikasi fungsi dibagi ke dalam 11 fungsi utama dan dirinci ke dalam 79 sub fungsi. Belanja daerah yang dialokasikan secara tepat ke pos-pos belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi Pelayanan Umum menjadi belanja menurut fungsi terbesar yang dialokasikan, hal tersebut mencerminkan fungsi utama pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 23,53% sebagaimana yang

diamanatkan oleh undang-undang. Urusan pendidikan mendapatkan porsi sebesar Rp2.7 triliun utamanya untuk membangun bangunan sekolah baru dan rehabilitasi terhadap bangunan sekolah yang sudah ada/rusak berat.

2. Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Tabel Data BLUD di Provinsi Riau (dalam miliar Rp)

Nama BLUD	Pemprov/ Pemda	Jumlah Pegawai PNS	Jumlah Pegawai Non	Total PNBP	Nilai Aset per 31-12-2017
RSUD Arifin Ahmad	Riau	805	676	221.150	792.545
RSUD Petala Bumi	Riau	161	245	17.694	57.938
RS Jiwa Tampan	Riau	215	173	84.984	178.202
RSUD Bangkinang	Kampar	271	84	32.000	105.726
RSUD Mandau	Bengkalis	194	453	47.000	118.113
RSUD Bengkalis	Bengkalis	237	246	33.600	179.507
RSUD Indrasari	Indragiri Hulu	146	233	37.556	122.358
RSUD Raja Musa	Indragiri Hilir	24	98	3.773	21.260
RSUD Puri Husada	Indragiri Hilir	225	313	63.663	80.144
RSUD Tengku Sulung	Indragiri Hilir	19	104	1.036	14.273
RSUD Rokan Hulu	Rokan Hulu	173	356	37.335	3.538
RSUD DR Pratomo	Rokan Hilir	153	293	17.200	8.967
RSUD Tengku Rafi'an	Siak	172	448	23.621	48
RSUD Kep. Meranti	Kep. Meranti	88	326	16.692	99.828
RSUD Kota Dumai	Kota Dumai	294	467	78.085	157.776
Total		**3.177**	**4.515**	**715.390,08**	**1.940.221**

Sumber: Pemda (diolah)

Realisasi PNBP di Provinsi Riau tahun 2017 hanya berasal dari Pendapatan PNBP lainnya dan Pendapatan BLU. Pada tahun 2017 realisasi PNBP berjumlah Rp838,37 Miliar atau 36,81% dari target yang telah ditentukan. Dari data yang disajikan di atas, total pendapatan PNBP BLUD mencapai Rp715 miliar atau 85% dari total PNBP, dapat diasumsikan bahwa pendapatan BLUD mempunyai porsi yang signifikan.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2018 diperkirakan dapat direalisasikan sebesar Rp28,52 triliun atau 92,52% dari target pendapatan. Sementara itu, perkiraan belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp26,91 triliun atau 97,82% dari pagu belanja.

Tabel Perkiraan Realisasi APBD se-Riau s.d. Triwulan IV 2018 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi thd Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi
Pendapatan Daerah	30.826,97	6.592,81	21,39	28.521,73	92,52
Belanja Daerah	27.512,44	2.929,71	9,30	26.912,27	97,82
Surplus/Defisit	(1.226,36)	3.311,11	(294,56)	1.609,46	(131,24)

Sumber: BPKAD, diolah dan hasil prognosis menggunakan *forecasting*

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau s.d. Triwulan III Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2018			2017	Kenaikan
	Pusat	Daerah	Konsol	Konsol	
Pendapatan Negara	**9.942**	**19.413**	**14.060**	**14.025**	0,24%
Pendapatan Perpajakan	9.339	2.892	12.231	11.788	3,76%
Pendapatan Bukan Pajak	603	1.184	1.787	2.143	-16,58%
Hibah	-	40	40	16	146,11%
Transfer	-	15.295	-	77	-100%
Belanja Negara	**21.986**	**15.773**	**22.464**		**12,65%**
Belanja Pemerintah	5.845	14.342	20.188		2,83%
Transfer	16.140	1.430	2.275		634,44%
Surplus/(Defisit)	**(12.044)**	**3.639**	**(8.404)**		**42,06%**
Pembiayaan	**-**	**229**	**229**		**-86,82%**
Penerimaan Pembiay. Daerah	-	249	249		-85,76%
Pengeluaran Pembiay. Daerah	-	20	20		0,00%
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	**(12.044)**	**3.869**	**(8.174)**		**95,99%**

Sumber: LKPK Triwulan III Tahun 2018 dan 2017 Provinsi Riau

Sampai dengan triwulan III 2018 pendapatan konsolidasian tumbuh 0,24% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan belanja konsolidasian meningkat lebih tinggi sebesar 12,65%. Hal ini berakibat pada kenaikan defisit konsolidasian yang signifikan sebesar 42,06% menjadi Rp12,04 triliun.

B. Pendapatan Konsolidasian

Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan III 2018 sebesar Rp14,06 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan Rp12,23 triliun atau 87,00% diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian Rp1,78 triliun (12,72%). Peningkatan pendapatan konsolidasian terutama disebabkan oleh pendapatan pajak yang tumbuh sebesar 3,76%.

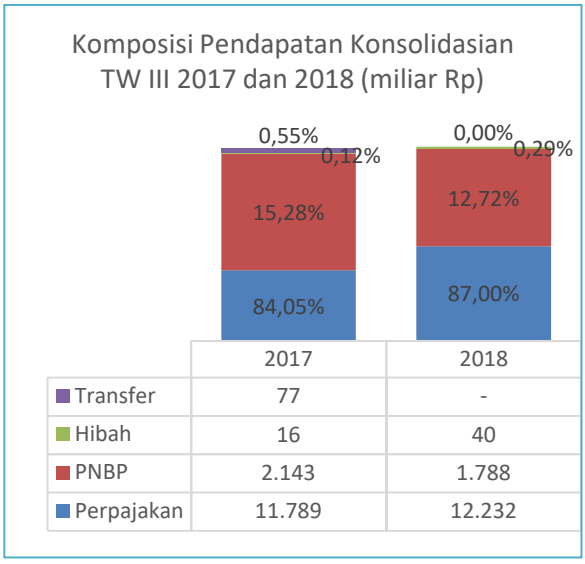

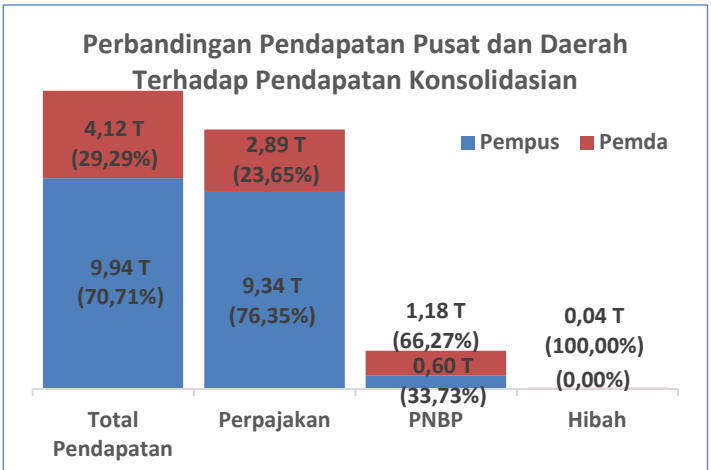

Sumber: LKPK TW III 2018 Prov. Riau (diolah)

Pendapatan Konsolidasian berasal dari penerimaan pemerintah pusat Rp9,94 triliun atau 70,71 persen, terbanyak berasal dari pendapatan perpajakan Rp9,34 triliun. Sementara itu, pendapatan daerah dengan porsi Rp4,12 triliun atau 29,29 persen berasal dari pendapatan perpajakan sebesar Rp2,89 triliun dan PNBP Rp1,18 triliun. Peningkatan pendapatan konsolidasian sebesar Rp34,33 miliar atau 0,24% didukung oleh peningkatan pendapatan perpajakan sebesar Rp443,27 miliar dibanding triwulan III tahun sebelumnya. Sementara itu PNBP Konsolidasian justru mengalami penurunan sebesar 355,49 miliar.

Apabila dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi Riau triwulan III tahun 2018 yang berada di level 2,98%, pendapatan konsolidasian yang terealisasi Rp14,060 triliun juga tumbuh 0,24%, ini menunjukkan adanya dampak yang positif dari efek pengganda pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan konsolidasian.

Pendapatan Konsolidasian TW III 2017-2018 (miliar Rp)

Uraian	2017	2018	Kenaikan
	Realisasi	Realisasi	
Perpajakan	11.788	12.232	3,76%
PNBP	2.143	1.788	-16,58%
Hibah	16	40	146,11%
Transfer	77	-	-100%
Total	**14.025**	**14.060**	**0,24%**
PDRB (Harga Konstan)	119.500	196.170	2,98%

Sumber: LKPK TW III 2018 dan 2017 (diolah)

C. Belanja Konsolidasian

Belanja Konsolidasian triwulan III tahun 2018 Provinsi Riau mencapai Rp22,46 triliun dengan porsi terbesarnya adalah belanja pegawai sebesar 41,16%, diikuti belanja barang 30,00%. Sementara itu belanja modal menyumbang porsi 12,82%. Belanja konsolidasian terbesar berasal dari belanja pemerintah daerah yang mencapai 70,21%, sedangkan belanja pemerintah pusat hanya memberikan andil 29,79%.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan konsolidasian, bila dibandingkan periode yang sama tahun 2017 belanja konsolidasian mengalami peningkatan signifikan sebesar 12,65%, jauh lebih tinggi dari pada peningkatan pendapatan yang hanya 0,24%.

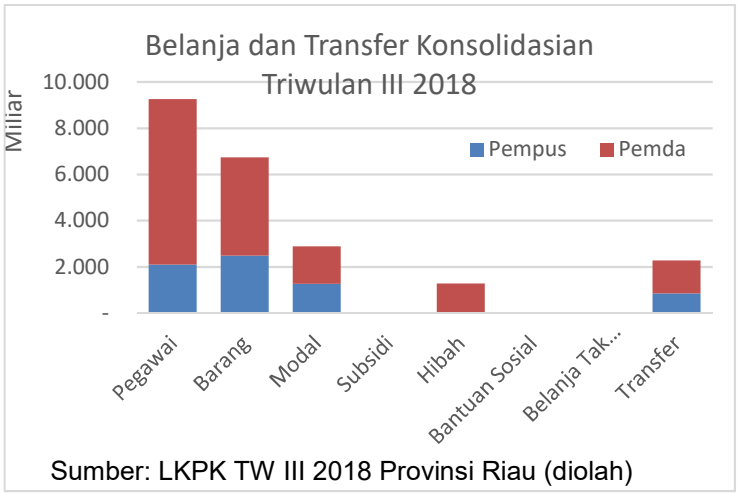

Sumber: LKPK TW III 2018 Provinsi Riau (diolah)

Peningkatan belanja konsolidasian disebabkan adanya pertumbuhan seluruh jenis belanja. Hal ini memicu kenaikan defisit anggaran dari Rp4,17 triliun menjadi Rp8,17 triliun. Kenaikan defisit ini disebabkan jumlah belanja yang terus meningkat yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan.

Grafik Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2018

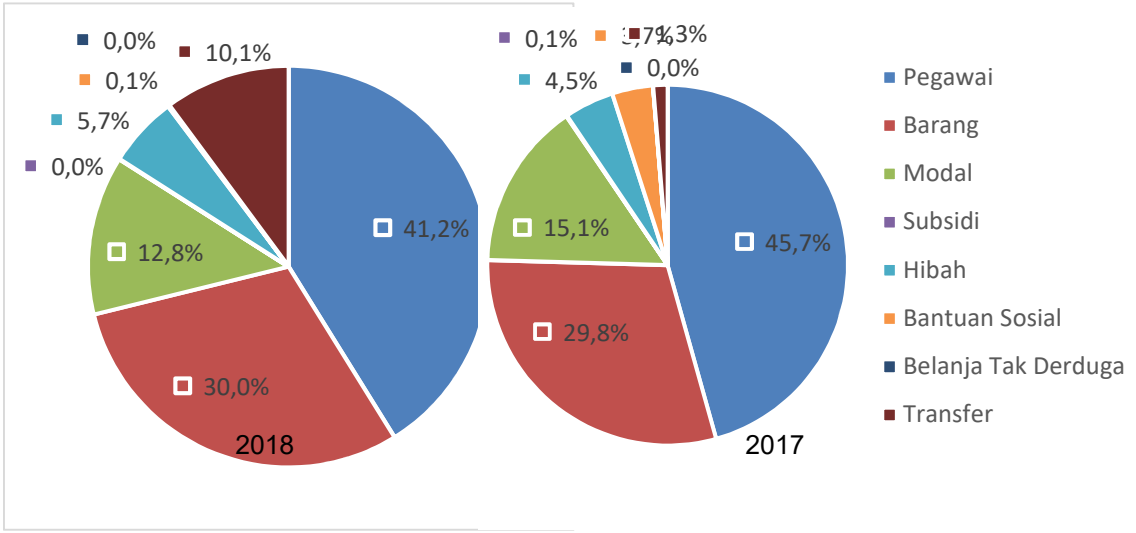

Sumber: LKPK Triwulan III 2017 dan 2018 Provinsi Riau diolah)

Komposisi realisasi belanja konsolidasian triwulan III 2018 berubah dibandingkan triwulan yang sama pada tahun lalu. Pada 2018 porsi belanja belanja hibah dan transfer masing-masing meningkat menjadi 5,7% dan 10,1%, sedangkan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal turun masing-masing sebesar 4,5%, 0,2%, dan 2,3%.

Apabila dibandingkan dengan PDRB Riau, belanja konsolidasian pemerintah mampu mendorong stimulus perekonomian regional, ditandai dengan adanya peningkatan PDRB atau pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan TPT, serta peningkatan IPM yang mengindikasikan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2017 dan 2018

Indikator Ekonomi Regional	2017	2018
Belanja Pemerintah (miliar rupiah)	24.100	22.464
Pertumbuhan ekonomi (%)	2,85	2,98
Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB (%)	13,58	11,45
Tingkat Kemiskinan (%)	7,67	7,39
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,22	6,20
Indeks Pembangunan Manusia	71,67	71,79

Sumber: LKPK Triwulan III 2018 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau, diolah

D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB

Tabel Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Riau Triwulan III 2018

STATEMENT OF GOVERNMENT OPERATIONS	General Government
TRANSACTIONS AFFECTING NET WORTH:	
Revenue	**38.953.534.425.985,0**
Taxes	12.230.427.468.095,0
Social contributions	...
Grants	2.982.455.177.130,0
Other revenue	23.740.651.780.760,0
Expense	**9.726.538.989.582,0**
Compensation of employees	2.210.394.686.408,0
Use of goods and services	2.123.685.203.564,0
Consumption of fixed capital	...
Interest	0,0
Subsidies	9.359.911.519,0
Grants	3.876.886.522.934,0
Social benefits	10.387.206.195,0
Other expense	1.495.825.458.962,0
Gross operating balance (1-2+23+NOBz)	**29.226.995.436.403,0**
Net operating balance (1-2+NOBz) c/	**29.226.995.436.403,0**
TRANSACTIONS IN NONFINANCIAL ASSETS:	
Net Acquisition of Nonfinancial Assets	**1.265.817.704.990,0**
Fixed assets	1.259.531.450.808,0
Change in inventories	0,0
Valuables	...
Nonproduced assets	6.286.254.182,0
Net lending / borrowing (1-2+NOBz-31)	**27.961.177.731.413,0**
TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING):	
Net acquisition of financial assets	**27.961.345.586.163,0**
Domestic	27.961.345.586.163,0
Foreign	0,0
Net incurrence of liabilities	**0,0**
Domestic	0,0
Foreign	0,0

Sumber: LSKP Triwulan III 2018 Provinsi Riau

Konsumsi pemerintah pada triwulan III 2018 sebesar Rp9,72 triliun. Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 4,95% dari PDRB sebesar Rp196,17 triliun. Sementara itu, kontribusi pemerintah terhadap PDRB dari investasi PMTB sebesar 0,64%. Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset tetap yang berjumlah Rp1,26 triliun.

Kontribusi pemerintah dari konsumsi pemerintah memberikan pengaruh jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsumsi pemerintah berkontribusi lebih besar dibandingkan kontribusi dalam investasi. Hal ini sesuai dengan kondisi perekonomian di Riau yang tumbuh lebih lambat dibandingkan provinsi lainnya, sehingga konsumsi pemerintah lebih dibutuhkan untuk segera memperbaiki kondisi perekonomian.

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Optimalisasi BUMDes untuk Akselerasi Perekonomian Desa (Riau Pos ,28 September 2018)

Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan MoU bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau dan BNI Kantor Cabang Pekanbaru pada Rabu (26/9). Kerja sama saling menguntungkan ini berkaitan dengan Pemberdayaan BUMDesa dalam rangka pemanfaatan dana desa di wilayah Kabupaten Kampar. Dari kerja sama ini diharapakan ada akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Dalam kerja sama ini, ada 21 BUMDes yang dijadikan contoh dan dibina BNI dan Kanwil DJPb Provinsi Riau. Harapannya BUMDes ini dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus nanti dapat menjadi prototype BUMDes di Riau maupun Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik indonesia Nomor 19 tahun 2017, prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2018 adalah untuk membiayai bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa layanan,dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa lahir sebagai lembaga desa yang berfungsi menciptakan kesejahteraan warga dengan

memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki desa dan didukung modal dari penyertaan dana desa.

Dari sekitar 1500-an desa yang berada di Provinsi Riau, sebagian besar telah memiliki BUMDesa. Perkembangan BUMDesa di Provinsi Riau belum begitu menggembirakan dan hanya sebagian kecil saja yang dapat dikatakan berhasil dari sisi besarnya jumlah asset yang dikelola. Sementara sebagian besar lainnya masih menghadapi permasalahan dalam proses pengembanganya. Dari hasil identifikasi sementara terhadap BUMDesa yang ada di Provinsi Riau tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan BUMDesa dapat dikategorikan dalam 3 hal, yaitu : kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDesa, permodalan dan pemasaran atau pengembangan usaha BUMDesa. Pengembangan BUMDesa telah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau dan mengharapkan BUMDesa sebagai lembaga lembaga ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Desa dapat berkontribusi dalam pengembangan perekonomian Desa. Disamping itu BUMDesa juga diharapkan dapat berperan dalam penurunan angka kemiskinan di Desa dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa.

B. Tiga Kawasan Industri di Provinsi Riau, Tribun Pekanbaru 1/7/2018

Pemerintah Pusat menetapkan tiga kawasan Industri di Provinsi Riau namun dari tiga kawasan yang ditetapkan tersebut belum semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tiga Kawasan industri yang sudah ditetapkan pusat tersebut yakni Kawasan industri Dumai, Kawasan Industri Tanjung Buton dan Kawasan Industri Buruk Bakul Bengkalis. Namun yang baru berkembang adalah Kawasan Industri Dumai. Sedangkan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) masih dalam proses pengembangan. KITB dibentuk sesuai Perda No 7/2004 tentang Pembentukan KITB. KITB merupakan BUMD Kab . Siak. APBD Siak yang digunakan untuk penyertaan modal di BUMD tsb pada tahun 2004 sebesar Rp.37 miliar. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang terletak, di Kabupaten Siak Provinsi Riau, sebagai pusat pengembangan industri dan pelabuhan sangat berpotensi di kawasan segitiga Singapura-Johor-Riau (Sijori). Apalagi saat ini terus digesa pengembangannya oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

Sesuai dengan peraturan Presiden (Perpres) No.3 tahun 2016 Jo Peraturan Presiden tahun 58 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), KITB ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Proyek ini meliputi Pengembangan Insfrastruktur jalan Pekanbaru menuju KITB, Pengembangan jaringan Sumbet Daya Air, serta Pengembangan sistem transportasi maupun pembangunan

fasilitas dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Buton. Dengan dijadikannya Tanjung Buton sebagai proyek strategis nasional, maka akan mengalir dana dari APBN. Diharapan KITB ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak.

Pemerintah Kabupaten Siak saat ini sedang mengajukan pengusulan ke dewan Nasional KEK agar KITB sebagai salah satu KEK unggulan di Provinsi Riau. Segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan pengusulan KEK, baik yang sifatnya teknis, administrasi maupun yang sifatnya berkenaan dengan aspek hukum sedang dipersiapkan.Semangat Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengembangkan KITB menjadi KEK unggulan di Riau selain KEK Dumai , sejalan dengan semangat Master Plan (Rencana Induk) Percepatan Pembangunan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3I). yang menjadi acuan dalam mengembangkan kebijakan perekonomian Indonesia.